

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa, termasuk dalam sektor kesehatan. Di Indonesia, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu perubahan penting dalam regulasi terbaru adalah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022.

Dalam sektor kesehatan, rumah sakit sangat bergantung pada ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan medis. Distribusi obat dan alat kesehatan di rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan aksesibilitas pasien terhadap perawatan medis. Penerapan PPN pada komponen ini dapat mempengaruhi harga jual, ketersediaan, serta akses pasien terhadap pengobatan, sehingga perlu dievaluasi secara mendalam.

Penerapan PPN pada distribusi obat dan alat kesehatan di rumah sakit mengikuti aturan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017, obat yang masuk dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) serta obat yang digunakan dalam program pemerintah tertentu dibebaskan dari PPN. Namun, obat yang tidak termasuk dalam daftar tersebut dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Untuk alat kesehatan, berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2021, alat yang dikategorikan sebagai barang strategis mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, sedangkan alat kesehatan lainnya tetap dikenakan tarif PPN yang sama. Selain itu, produk farmasi tertentu, seperti vaksin yang digunakan dalam program pemerintah, juga mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Namun, produk farmasi lainnya tetap dikenakan tarif PPN yang berlaku.

Penerapan PPN dalam distribusi obat dan alat kesehatan di rumah sakit menimbulkan berbagai dampak yang signifikan. Dari sisi rumah sakit, adanya PPN dapat meningkatkan biaya operasional karena harga pembelian obat dan alat kesehatan menjadi lebih mahal. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan tarif layanan kesehatan sebagai upaya rumah sakit untuk menutupi biaya tambahan akibat pajak tersebut. Selain itu, penerapan PPN juga menambah kompleksitas administrasi perpajakan yang harus dikelola oleh rumah sakit, terutama dalam pencatatan dan pelaporan pajak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesalahan dalam administrasi pajak dapat berdampak pada sanksi atau denda yang membebani rumah sakit secara finansial.

Dari sisi pasien, penerapan PPN dapat berdampak langsung pada peningkatan harga obat dan alat kesehatan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi biaya perawatan medis secara keseluruhan. Bagi pasien yang harus membayar secara mandiri tanpa adanya subsidi atau asuransi kesehatan, kenaikan harga ini dapat menjadi kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Pasien dari kalangan ekonomi menengah ke bawah mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh obat atau alat kesehatan yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pengobatan atau menurunkan tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani terapi medis.

Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia (RSU UKI) merupakan salah satu rumah sakit swasta yang berlokasi di Jakarta Timur dan beroperasi sebagai bagian dari institusi pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Rumah sakit ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang medis. RSU UKI menyediakan berbagai layanan kesehatan, termasuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, bedah, serta layanan spesialis dan subspecialis. Sebagai rumah sakit yang melayani berbagai lapisan masyarakat, termasuk pasien BPJS maupun pasien umum, kebijakan perpajakan seperti PPN dalam distribusi obat dan alat kesehatan dapat berpengaruh terhadap biaya operasional rumah sakit dan harga layanan kesehatan bagi pasien.

Sebagai bagian dari sistem kesehatan di Indonesia, RSUD UKI juga menghadapi tantangan dalam penerapan kebijakan PPN. Kenaikan harga obat dan alat kesehatan yang dikenakan PPN dapat mempengaruhi efisiensi rumah sakit dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi PPN di rumah sakit ini menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap biaya operasional rumah sakit dan aksesibilitas pasien terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Dampak penerapan PPN terhadap distribusi obat dan alat kesehatan juga berpengaruh pada penerimaan negara. Kebijakan ini di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan pajak yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam bidang kesehatan. Namun, di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan regulasi yang tepat, kebijakan ini dapat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan PPN dalam sektor kesehatan agar dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan berbagai dampak tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap penerapan PPN pada distribusi obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum UKI guna memahami sejauh mana kebijakan perpajakan ini mempengaruhi biaya operasional rumah sakit, harga layanan kesehatan, serta aksesibilitas pasien terhadap pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan PPN dalam sektor kesehatan dan mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan oleh rumah sakit serta pemerintah dalam mengelola dampak pajak ini agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam menyusun strategi perpajakan yang lebih seimbang antara kebutuhan negara dalam meningkatkan pendapatan serta memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem kesehatan di Indonesia, RSUD UKI juga menghadapi tantangan dalam penerapan kebijakan PPN. Kenaikan harga obat dan alat kesehatan yang dikenakan PPN dapat mempengaruhi efisiensi rumah sakit dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi PPN di rumah sakit ini menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap biaya operasional rumah sakit dan aksesibilitas pasien terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Dampak penerapan PPN terhadap distribusi obat dan alat kesehatan juga berpengaruh pada penerimaan negara. Kebijakan ini di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan pajak yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam bidang kesehatan. Namun, di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan regulasi yang tepat, kebijakan ini dapat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan PPN dalam sektor kesehatan agar dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan berbagai dampak tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap penerapan PPN pada distribusi obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum UKI guna memahami sejauh mana kebijakan perpajakan ini mempengaruhi biaya operasional rumah sakit, harga layanan kesehatan, serta aksesibilitas pasien terhadap pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan PPN dalam sektor kesehatan dan mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan oleh rumah sakit serta pemerintah dalam mengelola dampak pajak ini agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam menyusun strategi perpajakan yang lebih seimbang antara kebutuhan negara dalam meningkatkan pendapatan serta memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana prosedur pengumpulan data atas PPN Masukan obat dan peralatan kesehatan Rumah sakit Umum UKI?
- 1.2.2 Bagaimana prosedur perhitungan PPN dalam sistem pembelian dan Penjualan Rumah Sakit Umum UKI?
- 1.2.3 Bagaimana pelaporan PPN dalam sistem Keuangan Rumah Sakit Umum UKI?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis penerapan PPN terhadap distribusi obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum UKI, termasuk bagaimana kebijakan perpajakan di terapkan dalam operasional rumah sakit.
- 1.3.2 Mempelajari mekanisme perhitungan PPN masukan atas obat dan alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit Umum UKI, serta bagaimana rumah sakit mengelola pajak tersebut dalam sistem keuangannya.
- 1.3.3 Mengidentifikasi prosedur pencatatan dan pelaporan PPN dalam sistem keuangan Rumah Sakit Umum UKI

1.4 Manfaat Penyusun Laporan Tugas Akhir

1.4.1 Bagi Penulis

- 1.4.1.1 Mengetahui secara langsung permasalahan di bidang perpajakan yang di hadapi oleh Rumah Sakit Umum UKI
- 1.4.1.2 Mengembangkan keterampilan analisis dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap aspek keuangan dan operasional rumah sakit.
- 1.4.1.3 Memperoleh pengalaman langsung dalam penelitian kebijakan perpajakan di bidang kesehatan, yang dapat menjadi bekal bagi penulis dalam karier akademik maupun profesional di bidang perpajakan, keuangan, atau manajemen rumah sakit.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit UKI

- 1.4.2.1 Sebagai sarana dalam menjalin kerjasama antara Rumah Sakit Umum UKI dengan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia khususnya Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan
- 1.4.2.2 Mendukung peran RSU UKI sebagai institusi pendidikan dan penelitian, dengan menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian akademik terkait kebijakan perpajakan dan kesehatan.
- 1.4.2.3 Menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dalam menyusun kebijakan keuangan dan perpajakan yang lebih efektif serta meningkatkan perencanaan anggaran untuk pengadaan obat dan alat.

